

PRODUKSI RUANG DALAM TRANSPORTASI PUBLIK : STUDI KASUS RUANG KHUSUS WANITA DI TRANSJAKARTA

Amanda Aulia Maharani, Ikhlasih Dalimoenthe, Marista Christina Shally K.

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta

amandamhrn76@gmail.com

Diterima Redaksi: 08-08-2026 | Selesai Direvisi: 12-09-2026 | Diterbitkan Online: 26-09-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze how women-only spaces are produced as social spaces and how power relations and gender relations are formed through their use in practice. The study employed a qualitative approach using a case study method conducted at Kampung Melayu Transjakarta Station from January to April 2026. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving eleven informants and were further validated through triangulation with the East Jakarta Region II Field Coordinator. The analysis was conducted using Henri Lefebvre's Theory of the Production of Space, which conceptualizes space as the product of the interaction between policy, spatial practices, and users' lived experiences. The findings indicate that women-only spaces are shaped not only by institutional policies but also through everyday spatial practices involving institutions, staff members, and passengers. From Henri Lefebvre's perspective, women-only spaces constitute social spaces produced through policy, spatial practices, and users' lived experiences. Consequently, they not only construct a sense of safety but also reproduce and serve as sites for negotiating gender relations within the use of public transportation.

Keywords : Women-only Space, Public Transportation, Transjakarta, Gender Relations, Production of Space.

ABSTRAK

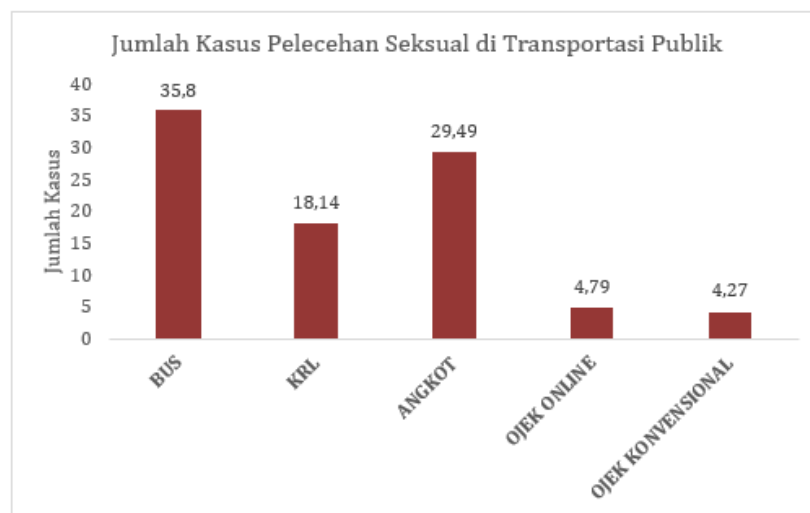
Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana ruang khusus wanita diproduksi sebagai ruang sosial serta bagaimana relasi kuasa dan relasi gender terbentuk dalam praktik penggunaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Halte Transjakarta Kampung Melayu pada Januari–April 2026. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sebelas informan serta diperkuat melalui triangulasi dengan Koordinator Lapangan Wilayah Jakarta Timur II. Analisis dilakukan menggunakan Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre yang memandang ruang sebagai hasil interaksi antara kebijakan, praktik penggunaan, dan pengalaman pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang khusus wanita tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan institusi, tetapi juga diproduksi melalui praktik penggunaan ruang sehari-hari yang melibatkan institusi, petugas, dan penumpang. Dalam perspektif Henri Lefebvre, ruang khusus wanita merupakan ruang sosial yang diproduksi melalui kebijakan, praktik penggunaan, dan pengalaman pengguna, sehingga tidak hanya membentuk konstruksi rasa aman, tetapi juga mereproduksi sekaligus menjadi arena negosiasi relasi gender dalam penggunaan transportasi publik.

Kata Kunci : Ruang Khusus Wanita, Transjakarta, Relasi Gender, Relasi Kuasa, Produksi Ruang.

Pendahuluan

Transportasi publik merupakan salah satu ruang publik yang mempertemukan berbagai individu dengan latar belakang sosial yang beragam dalam aktivitas mobilitas sehari-hari. Sebagai ruang publik, transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan, tetapi juga menjadi ruang sosial tempat berlangsungnya berbagai interaksi antarpengguna. Namun, ruang transportasi publik belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman bagi seluruh masyarakat, terutama perempuan. Berbagai kasus pelecehan seksual yang masih terjadi di transportasi publik menunjukkan bahwa pengalaman menggunakan ruang publik tidak selalu dirasakan secara setara oleh laki-laki dan perempuan.

Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Transportasi Publik



Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan hasil survei KRPA, 2026.

Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) merilis hasil Survei Nasional Pelecehan Seksual di Ruang Publik pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa transportasi umum merupakan lokasi kedua tertinggi terjadinya pelecehan seksual setelah jalan umum. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 46,80% responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Secara lebih rinci, 35,8% responden mengalami pelecehan di bus, sementara 29,49% responden mengalami pelecehan di angkutan kota. Komnas Perempuan juga turut menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2020–2024, Komnas Perempuan menerima sebanyak 19 pengaduan mengenai pelecehan seksual di transportasi publik dengan bentuk kekerasan yang meliputi pelecehan fisik, pelecehan verbal, hingga pemerkosaan (Komnas Perempuan, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa transportasi publik sebagai ruang mobilitas sehari-hari memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap terjadinya

pelecehan seksual, sementara berbagai kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki persepsi keamanan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki ketika menggunakan transportasi publik.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transjakarta menyediakan ruang khusus wanita sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang perempuan. Ruang khusus ini ditempatkan di bagian depan bus dan diperuntukkan bagi penumpang perempuan sebagai bentuk perlindungan dari potensi pelecehan seksual selama perjalanan. Meskipun demikian, keberadaan ruang khusus wanita tidak hanya dipahami sebagai fasilitas fisik atau kebijakan pelayanan, tetapi juga memunculkan beragam pemaknaan di kalangan penggunanya. Sebagian pihak memandang kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan yang diperlukan, sementara pihak lain mempertanyakan pemisahan ruang berdasarkan gender karena dinilai berpotensi mereproduksi batas-batas gender di ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang khusus wanita merupakan ruang sosial yang dipenuhi oleh pengalaman, praktik, dan negosiasi makna para penggunanya.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas efektivitas ruang khusus wanita dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang perempuan atau mengevaluasi implementasi kebijakan transportasi yang responsif gender. Namun, penelitian yang mengkaji ruang khusus wanita sebagai ruang sosial melalui perspektif Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre masih sangat terbatas. Padahal, Lefebvre memandang bahwa ruang tidak hanya dibentuk melalui kebijakan institusi, tetapi juga diproduksi melalui praktik penggunaan sehari-hari dan pengalaman para penggunanya. Perspektif ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan ruang khusus wanita membentuk relasi sosial, relasi kuasa, dan relasi gender dalam transportasi publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana ruang khusus wanita di Transjakarta diproduksi sebagai ruang sosial serta bagaimana relasi kuasa dan relasi gender terbentuk dalam praktik penggunaannya. Penelitian dilakukan di Halte Transjakarta Kampung Melayu yang merupakan salah satu halte transit dengan mobilitas penumpang tinggi sehingga merepresentasikan dinamika penggunaan ruang publik perkotaan. Dengan menggunakan Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai ruang khusus wanita tidak hanya sebagai kebijakan

perlindungan, tetapi juga sebagai ruang yang diproduksi, dipraktikkan, dan dimaknai secara sosial oleh para penggunanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis bagaimana ruang khusus wanita di Transjakarta diproduksi sebagai ruang sosial serta bagaimana relasi kuasa dan relasi gender terbentuk dalam praktik penggunaannya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, serta makna yang dibangun oleh individu terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan konteks kehidupan sehari-hari (Creswell & David Creswell, n.d.). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil akhir dari suatu kebijakan, tetapi juga pada proses sosial yang melatarbelakangi terbentuknya praktik penggunaan ruang khusus wanita. Metode studi kasus dipilih karena memberikan kesempatan untuk mengkaji fenomena secara mendalam dalam konteks yang nyata sehingga mampu menggambarkan dinamika penggunaan ruang khusus wanita sebagai bagian dari kehidupan sosial di transportasi publik.

Penelitian dilaksanakan di Halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada periode Januari–April 2026. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan salah satu halte transit utama dengan mobilitas penumpang yang tinggi dan melayani berbagai koridor Transjakarta yang menyediakan ruang khusus wanita. Tingginya intensitas interaksi antarpengguna transportasi publik menjadikan lokasi ini relevan untuk mengamati praktik penggunaan ruang khusus wanita serta interaksi antara penumpang, petugas, dan kebijakan yang mengatur penggunaan ruang tersebut. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan pengguna terdiri atas penumpang perempuan dan laki-laki yang merupakan pengguna layanan Transjakarta secara rutin, khususnya pekerja atau komuter yang memiliki pengalaman menggunakan ruang khusus wanita atau area reguler. Penumpang perempuan dipilih karena merupakan pengguna utama ruang khusus wanita dan memiliki pengalaman langsung dalam memanfaatkan ruang tersebut, sedangkan penumpang laki-laki dipilih sebagai informan pembanding untuk memperoleh perspektif mengenai kebijakan pemisahan ruang berdasarkan gender. Selain pengguna, penelitian juga melibatkan petugas Transjakarta yang memiliki pengalaman dalam mengelola dan mengawasi penggunaan ruang khusus wanita di lapangan sehingga dapat memberikan perspektif mengenai implementasi kebijakan dan kondisi operasional. Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian melibatkan

sebelas informan yang terdiri atas lima penumpang perempuan, tiga penumpang laki-laki, dan tiga petugas Transjakarta. Komposisi informan tersebut ditentukan berdasarkan relevansi dan kebutuhan data penelitian dengan jumlah penumpang perempuan lebih banyak karena penelitian berfokus pada pengalaman dan pemaknaan pengguna utama ruang khusus wanita. Sementara itu, penumpang laki-laki sebagai perspektif pembanding dan petugas sebagai pihak yang memberikan perspektif institusional sekaligus operasional. Untuk memperkuat kredibilitas data, penelitian juga melibatkan Koordinator Lapangan Wilayah Jakarta Timur II sebagai triangulator.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik penggunaan ruang khusus wanita, pola interaksi antarpengguna, serta kondisi operasional layanan Transjakarta di Halte Kampung Melayu. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pemaknaan penumpang perempuan, penumpang laki-laki, serta petugas terhadap keberadaan ruang khusus wanita. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui berbagai dokumen, regulasi, serta informasi yang berkaitan dengan kebijakan ruang khusus wanita di Transjakarta. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber data (Kane & Denzin, 1978). Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui wawancara dengan Koordinator Lapangan Wilayah Jakarta Timur II sebagai triangulator.

Selanjutnya, seluruh temuan dianalisis menggunakan Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre melalui tiga dimensi utama, yaitu *spatial practice* (praktik spasial), *representations of space* (representasi ruang), dan *representational space* (ruang representasional). Ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan bagaimana ruang khusus wanita diproduksi melalui kebijakan institusi, dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari, serta dimaknai oleh para pengguna. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa ruang khusus wanita tidak hanya merupakan fasilitas fisik dalam transportasi publik, tetapi juga merupakan ruang sosial yang dibentuk melalui interaksi antara kebijakan, praktik penggunaan, pengalaman pengguna, serta relasi kuasa dan relasi gender yang berkembang di dalamnya.

Hasil dan Pembahasan

Ruang Khusus Wanita sebagai Ruang Sosial di Transjakarta

Henri Lefebvre memandang ruang sebagai hasil dari proses sosial yang terus diproduksi melalui interaksi antara praktik kehidupan sehari-hari, kebijakan, dan pengalaman para aktor yang menggunakannya. Dalam perspektif ini, ruang bukan sekadar wadah fisik yang bersifat netral, melainkan ruang sosial yang dibentuk oleh relasi kekuasaan, kepentingan, dan aktivitas manusia (Lefebvre & Nicholson-Smith, 1991). Berdasarkan temuan penelitian, ruang khusus wanita di Transjakarta menunjukkan karakteristik tersebut karena keberadaannya tidak hanya berupa area tempat duduk yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara kebijakan institusi, praktik penggunaan oleh penumpang, serta pengalaman yang diperoleh selama menggunakan transportasi publik.

Produksi ruang khusus wanita melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda. Transjakarta sebagai institusi merancang kebijakan dan menetapkan aturan penggunaan ruang, petugas lapangan mengawasi implementasinya, sedangkan penumpang perempuan dan laki-laki mempraktikkan sekaligus memaknai ruang tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Interaksi antaraktor tersebut menunjukkan bahwa ruang khusus wanita terus diproduksi dan direproduksi melalui berbagai tindakan sosial yang berlangsung selama operasional layanan. Dengan demikian, keberadaan ruang khusus wanita tidak dapat dipahami sebagai ruang yang terbentuk secara alamiah, tetapi sebagai produk ruang sosial yang dibentuk melalui hubungan antara kebijakan, praktik penggunaan, dan pengalaman pengguna.

Praktik Spasial dalam Penggunaan Ruang Khusus Wanita

Dalam perspektif Henri Lefebvre, *spatial practice (perceived space)* merujuk pada ruang yang diproduksi melalui aktivitas, rutinitas, dan pola penggunaan dalam kehidupan sehari-hari (Hendra, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang khusus wanita di Transjakarta tidak hanya dibentuk oleh penanda fisik dan aturan formal, tetapi juga melalui praktik sosial yang terus direproduksi oleh penumpang dan petugas. Penumpang perempuan umumnya telah memahami ruang khusus sebagai area yang diperuntukkan bagi perempuan, sehingga secara konsisten memilih duduk atau berdiri di bagian depan bus, mengantre di pintu yang lebih dekat dengan ruang khusus, serta tetap bertahan di area tersebut meskipun bus dalam kondisi padat. Sebaliknya, penumpang laki-laki pada umumnya menyesuaikan perilakunya dengan menghindari ruang khusus dan berpindah ke area reguler apabila memasuki ruang

tersebut secara tidak sengaja. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan ruang tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga telah menjadi rutinitas yang membentuk pola penggunaan ruang dalam mobilitas sehari-hari.

Praktik penggunaan ruang juga dipengaruhi oleh kondisi operasional layanan. Pada jam sibuk, penumpang perempuan cenderung memanfaatkan ruang khusus sebagai strategi untuk meminimalkan risiko pelecehan seksual, sedangkan pada jam non-sibuk penggunaan ruang menjadi lebih fleksibel karena sebagian penumpang memilih tempat duduk yang terernyaraan sedia meskipun berada di area reguler. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu informan penelitian, yaitu saudara M.

“Kalau pas jam sibuk dan bus penuh pasti saya selalu di ruang khusus, tapi kalo siang itukan biasanya lebih kosong nah itu di mana aja sih yang penting dapet duduk. Pokoknya saya menyesuaikan aja, tapi satu yang pasti kalo harus berdiri ya milih diri di ruang khusus aja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ruang khusus wanita tidak bersifat mekanis, tetapi dinamis dengan menyesuaikan kondisi operasional dan kepadatan penumpang. Pola tersebut menunjukkan bahwa ruang terus diproduksi melalui kebiasaan dan keputusan pengguna dalam aktivitas mobilitas sehari-hari. Di sisi lain, masih ditemukan pelanggaran penggunaan ruang oleh penumpang laki-laki, terutama ketika bus dalam kondisi sangat padat atau ketika penumpang belum memahami aturan yang berlaku. Dalam situasi tersebut, petugas Transjakarta berperan aktif memberikan informasi, mengarahkan penumpang, dan melakukan pengawasan agar fungsi ruang khusus tetap berjalan sesuai kebijakan.

“Tiap hari itu pasti ada aja satu dua laki-laki yang masuk ruang wanita, apalagi pas rush hour; biasanya mungkin saking penuhnya jadi pada ga engeh. Kalo ada yang ketahuan masuk pasti kita sebagai pramusapa langsung menegur dan diarahkan ke belakang.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik spasial ruang khusus wanita terus dinegosiasikan antara penumpang, petugas, dan kondisi operasional. Dengan demikian, praktik spasial ruang khusus wanita menunjukkan bahwa ruang tersebut terus diproduksi melalui interaksi antara kebijakan, rutinitas pengguna, kondisi operasional, dan pengawasan petugas. Selain itu, praktik penggunaan ruang juga dipengaruhi oleh karakteristik penumpang, seperti perbedaan antara pengguna rutin pada hari kerja yang umumnya telah memahami aturan dengan penumpang akhir pekan yang lebih beragam. Pada hari kerja, mayoritas penumpang

merupakan pekerja yang secara rutin menggunakan Transjakarta sehingga telah terbiasa dengan sistem layanan dan aturan penggunaan ruang khusus wanita. Sebaliknya, pada akhir pekan, penumpang lebih banyak berasal dari masyarakat umum dan keluarga yang menggunakan Transjakarta untuk keperluan rekreasi, sehingga tingkat pemahaman terhadap aturan cenderung lebih beragam. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya penumpang yang belum memahami batas penggunaan ruang khusus wanita dan memerlukan arahan dari petugas. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Rikky Tambunan, selaku petugas keamanan Transjakarta yang menyatakan:

“Kalo hari libur Sabtu Minggu gitu kebanyakan kan penumpang bukan pekerja, mayoritas biasanya keluarga yang pada mau rekreasi dan mungkin mereka bukan pengguna rutin, jadi masih belum terbiasa dengan aturan. Sebagian dari mereka sih kooperatif kalo dikasih tau, tapi jujur masih banyak juga yang udah tau salah, tapi susah dibilangin”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik pengguna tidak hanya berkaitan dengan latar belakang penumpang, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap penggunaan ruang khusus wanita. Bagi para pengguna rutin, aturan cenderung telah menjadi bagian dari kebiasaan dalam menggunakan layanan Transjakarta, sedangkan pada pengguna tidak rutin, petugas masih perlu memberikan informasi dan melakukan pengawasan secara lebih intensif. Dengan demikian, praktik spasial ruang khusus wanita tidak berlangsung secara seragam, tetapi dipengaruhi oleh siapa yang menggunakan ruang tersebut dan seberapa jauh mereka telah memahami aturan yang mengaturnya. Dalam perspektif Lefebvre, temuan ini menegaskan bahwa ruang khusus wanita merupakan *perceived space*, yaitu ruang sosial yang terus direproduksi melalui kebiasaan, pengalaman, serta interaksi para penggunanya sehingga keberadaannya tidak hanya ditentukan oleh batas fisik, tetapi juga oleh praktik sosial yang berlangsung secara berulang dalam kehidupan sehari-hari.

Representasi Ruang melalui Kebijakan Transjakarta

Berdasarkan perspektif Henri Lefebvre, *representations of space (conceived space)* merupakan ruang yang diproduksi melalui perencanaan, kebijakan, dan pengaturan institusi (Ibadi, et al. 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang khusus wanita di Transjakarta merupakan bentuk *conceived space* yang dirancang sebagai respons terhadap tingginya risiko pelecehan seksual di transportasi publik sekaligus sebagai bagian dari pelayanan transportasi yang responsif gender. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyediaan area khusus di bagian

depan bus, pemasangan penanda visual, serta penyusunan aturan mengenai penggunaan ruang khusus wanita. Dengan demikian, ruang tersebut tidak terbentuk secara alamiah melalui interaksi penumpang, tetapi terlebih dahulu diproduksi melalui konseptualisasi dan perencanaan institusi untuk mengarahkan fungsi ruang sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Representasi ruang tersebut tidak hanya diwujudkan melalui desain fisik dan regulasi, tetapi juga melalui praktik pengelolaan oleh petugas Transjakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pramusapa dan petugas keamanan berperan aktif memberikan informasi, mengarahkan penumpang, serta menegur pelanggaran penggunaan ruang, terutama pada saat kondisi bus padat. Praktik pengawasan ini menunjukkan adanya relasi kuasa institusi dalam mengendalikan penggunaan ruang agar tetap berfungsi sebagai ruang perlindungan bagi perempuan. Oleh karena itu, ruang khusus wanita tidak hanya merepresentasikan kebijakan pemisahan ruang berdasarkan gender, tetapi juga mencerminkan bagaimana institusi memproduksi dan mengelola ruang sosial melalui aturan, pengawasan, dan pengendalian perilaku pengguna sesuai dengan tujuan menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam transportasi publik.

Ruang Representasional: Pemaknaan Penumpang terhadap Ruang Khusus Wanita

Dalam perspektif Henri Lefebvre, *representational space* (ruang representasional) merupakan ruang yang memperoleh makna melalui pengalaman hidup (*lived experience*) para penggunanya. Berbeda dengan *representations of space* yang dibentuk melalui kebijakan dan perencanaan institusi, ruang representasional lahir dari pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari (Lefebvre & Nicholson-Smith, 1991). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang khusus wanita dimaknai secara beragam oleh para pengguna. Bagi sebagian besar penumpang perempuan, ruang tersebut dipandang sebagai ruang yang memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan, terutama pada kondisi bus yang padat. Pemaknaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan Transjakarta, tetapi juga oleh pengalaman pribadi maupun pengalaman tidak langsung terkait pelecehan seksual di transportasi publik, serta persepsi terhadap potensi risiko selama perjalanan. Pengalaman tersebut mendorong sebagian penumpang perempuan menjadikan ruang khusus wanita sebagai strategi perlindungan diri. Bahkan, mereka bersedia menunggu bus berikutnya atau tetap berada di ruang khusus meskipun lebih padat.

Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu informan penelitian yang merupakan penumpang Perempuan, yaitu saudara A.

“Kalo saya selalu wajib hukumnya di ruang khusus wanita. Kurang nyaman soalnya kalo di gerbong campur. Bahkan kalo di gerbong wanita lebih padat juga saya jabanin dibanding harus ke gerbong reguler. Soalnya saya pernah punya pengalaman ga enak. Walaupun udah lama, tapi ya ada traumanya.”

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa makna ruang khusus wanita tidak hanya berasal dari fungsi fisiknya, tetapi juga terbentuk melalui pengalaman sosial dan psikologis pengguna. Bagi saudara A, ruang khusus bahkan menjadi pilihan yang tetap dipertahankan meskipun secara fisik lebih padat. Sebaliknya, sebagian besar penumpang laki-laki memaknai ruang khusus wanita sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan sekaligus aturan yang perlu dihormati dalam penggunaan transportasi publik. Mereka menilai kebijakan tersebut relevan karena mampu meningkatkan rasa aman bagi penumpang perempuan dan meminimalkan potensi ketidaknyamanan saat kondisi bus padat.

“Saya sih ga terlalu mempermasalahkan dan setuju aja dengan keberadaan ruang khusus wanita karena juga melihat keadaan yang sering kejadian adalah para wanita yang sampai saat ini masih sangat rentan jadi korban pelecehan.”

Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa penumpang laki-laki tidak selalu memandang ruang khusus sebagai bentuk pemisahan, tetapi sebagai kebijakan perlindungan yang dianggap relevan dengan kondisi transportasi publik. Perbedaan perspektif antara penumpang perempuan dan laki-laki tersebut memperlihatkan bahwa ruang khusus wanita tidak hanya memiliki makna tunggal, tetapi juga dibentuk melalui pengalaman, posisi, dan persepsi masing-masing pengguna. Namun, sebagian informan juga menilai bahwa pemisahan ruang berdasarkan gender hanya sebagai solusi praktis karena akar permasalahan tetap terletak pada perilaku sosial masyarakat sehingga diperlukan pengawasan dan edukasi yang lebih baik. Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa ruang khusus wanita tidak memiliki makna yang tunggal, tetapi terus diproduksi melalui pengalaman, posisi sosial, dan persepsi masing-masing pengguna. Dengan demikian, ruang khusus wanita tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik yang diatur oleh institusi, tetapi juga sebagai *representational space* yang merefleksikan rasa aman, perlindungan, serta negosiasi relasi gender dalam penggunaan transportasi publik.

Tabel 1.1 Perbedaan Pemaknaan Ruang Khusus Wanita oleh Penumpang Perempuan dan Penumpang Laki-Laki

Aspek Perbandingan	Penumpang Perempuan	Penumpang Laki-Laki
Pemaknaan Ruang Khusus Wanita	Melihat ruang khusus sebagai ruang aman dan nyaman untuk perempuan.	Aturan untuk perlindungan terhadap perempuan.
Fungsi Ruang	Mencegah terjadinya pelecehan seksual dan mengurangi rasa khawatir di perjalanan.	Bentuk respons terhadap tingginya angka kasus pelecehan seksual di transportasi publik.
Rasa Aman	Perasaan lebih aman, tenang, dan nyaman selama perjalanan.	Mengurangi risiko kesalahpahaman dengan penumpang perempuan (jauh dari tuduhan pelaku pelecehan).
Implementasi Ruang	Dinilai cukup mampu memberikan rasa aman, meski ruang masih terbatas dan cenderung lebih padat dibanding gerbong reguler.	Dinilai relevan sebagai solusi praktis sementara bukan solusi utama.
Pandangan tentang Kesenjangan Gender	Tidak dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan gender.	Meskipun setuju dengan kebijakan ruang khusus wanita, tetapi sebagian masih merasa bahwa keamanan dan kenyamanan juga perlu diperhatikan lagi untuk penumpang laki-laki.

Sumber : Olahan Peneliti, 2026.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penumpang perempuan dan laki-laki memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap ruang khusus wanita di Transjakarta, yang dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, dan posisi mereka sebagai pengguna transportasi publik. Penumpang perempuan cenderung memaknai ruang tersebut sebagai ruang perlindungan yang memberikan rasa aman dan nyaman selama perjalanan, sedangkan penumpang laki-laki lebih memaknainya sebagai bentuk pengaturan ruang yang bertujuan melindungi perempuan serta menjaga ketertiban di dalam transportasi publik. Meskipun demikian, kedua kelompok sama-sama

memandang bahwa ruang khusus wanita merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang.

Produksi Ruang dalam Membentuk Rasa Aman dan Relasi Gender di Ruang Khusus Wanita Transjakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang khusus wanita di Transjakarta tidak hanya diproduksi sebagai ruang fisik atau kebijakan institusional, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membentuk rasa aman dan relasi gender dalam transportasi publik. Dalam perspektif Henri Lefebvre, ruang merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan interaksi antara *representations of space* (kebijakan institusi), *spatial practice* (praktik penggunaan ruang), dan *representational space* (pengalaman serta pemaknaan pengguna). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dalam membentuk fungsi ruang khusus wanita. Kebijakan Transjakarta menyediakan kerangka formal melalui penyediaan ruang khusus, penetapan aturan penggunaan, serta pengawasan oleh petugas. Kebijakan tersebut kemudian diwujudkan melalui praktik penggunaan ruang oleh penumpang dalam aktivitas sehari-hari dan selanjutnya dimaknai berdasarkan pengalaman masing-masing pengguna. Dengan demikian, rasa aman yang dirasakan penumpang perempuan tidak muncul secara otomatis karena keberadaan ruang khusus, tetapi merupakan hasil dari proses produksi ruang yang berlangsung secara terus-menerus.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar penumpang perempuan memaknai ruang khusus wanita sebagai ruang yang memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan selama perjalanan. Rasa aman tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan ruang khusus, tetapi juga oleh kepatuhan penumpang terhadap aturan, pengawasan petugas, kondisi operasional transportasi, serta pengalaman pribadi atau tidak langsung terkait pelecehan seksual di ruang publik. Perempuan yang pernah mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual cenderung memiliki kebutuhan yang lebih besar terhadap ruang khusus wanita dibandingkan mereka yang tidak memiliki pengalaman serupa. Bahkan, sebagian informan memilih tetap berada di ruang khusus meskipun dalam kondisi padat atau menunggu bus berikutnya agar tetap dapat menggunakan area tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan pengalaman yang bersifat subjektif dan dibentuk oleh persepsi terhadap potensi Risiko sehingga ruang khusus wanita menjadi strategi perlindungan diri dalam aktivitas mobilitas sehari-hari.

Produksi ruang tersebut juga memperlihatkan bagaimana relasi gender dibentuk melalui kebijakan, praktik penggunaan ruang, dan pengalaman pengguna. Penumpang perempuan memaknai ruang khusus sebagai bentuk perlindungan yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan dengan lebih tenang, sedangkan sebagian besar penumpang laki-laki memaknainya sebagai aturan yang perlu dipatuhi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dan keamanan perempuan. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang mempertanyakan efektivitas pemisahan ruang berdasarkan gender karena dianggap belum menyelesaikan akar permasalahan pelecehan seksual. Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa relasi gender dalam ruang khusus wanita tidak bersifat tetap, tetapi terus diproduksi dan dinegosiasikan melalui pengalaman, posisi sosial, dan interaksi para pengguna selama menggunakan transportasi publik. Pada saat yang sama, petugas Transjakarta turut berperan menjaga keberlangsungan relasi tersebut melalui pengawasan dan pengarahan terhadap penggunaan ruang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Dengan demikian, ruang khusus wanita di Transjakarta merupakan produk ruang sosial yang dihasilkan melalui keterkaitan antara kebijakan institusi, praktik penggunaan ruang, dan pengalaman pengguna. Perspektif Henri Lefebvre memperlihatkan bahwa ruang khusus wanita tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan transportasi publik, tetapi juga menjadi arena produksi rasa aman sekaligus reproduksi dan negosiasi relasi gender. Temuan ini menegaskan bahwa makna ruang tidak hanya ditentukan oleh desain fisik maupun aturan formal, tetapi juga terus dibentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ruang khusus wanita dapat dipahami sebagai ruang sosial yang merefleksikan dinamika keamanan, perlindungan, dan relasi gender dalam transportasi publik perkotaan.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang khusus wanita di Transjakarta tidak hanya merupakan fasilitas fisik atau kebijakan pelayanan transportasi, tetapi juga merupakan ruang sosial yang diproduksi melalui interaksi antara kebijakan institusi, praktik penggunaan ruang, dan pengalaman para pengguna. Berdasarkan perspektif Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre, ruang khusus wanita terbentuk melalui tiga dimensi produksi ruang, yaitu *spatial practice*, *representations of space*, dan *representational space*. Kebijakan Transjakarta menyediakan kerangka formal melalui penyediaan ruang khusus dan pengawasan petugas yang kemudian diwujudkan dalam praktik penggunaan sehari-hari oleh penumpang serta dimaknai secara beragam berdasarkan pengalaman masing-masing. Dengan demikian, ruang khusus wanita

diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus melalui interaksi antara institusi, petugas, dan penumpang dalam kehidupan sehari-hari.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Teori Produksi Ruang Lefebvre dalam konteks transportasi publik dapat digunakan untuk melihat ruang gender bukan sebagai ruang yang bersifat tetap, melainkan sebagai ruang sosial yang terus dibentuk melalui hubungan antara kebijakan, praktik, dan pengalaman hidup. Ketiga dimensi produksi ruang tidak berdiri secara terpisah, tetapi saling memengaruhi dalam membentuk rasa aman dan relasi gender. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa ruang yang dirancang sebagai bentuk perlindungan dapat sekaligus menjadi arena reproduksi dan negosiasi relasi gender. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian produksi ruang di Indonesia dengan menunjukkan bahwa kebijakan berbasis gender tidak hanya menghasilkan pengaturan fisik atas ruang, tetapi juga membentuk pola interaksi, pemaknaan, serta relasi kuasa di dalam ruang publik.

Secara praktis, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penyediaan ruang khusus wanita perlu disertai dengan pengawasan yang konsisten, edukasi mengenai aturan penggunaan ruang, serta evaluasi terhadap penerapannya berdasarkan kondisi dan kebutuhan pengguna. Hal ini penting karena rasa aman tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ruang khusus, tetapi juga oleh kepatuhan pengguna, kondisi kepadatan, pengalaman penumpang, dan respons petugas ketika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, ruang khusus wanita sebaiknya diposisikan sebagai salah satu bagian dari kebijakan transportasi yang responsif gender, bukan sebagai satu-satunya solusi terhadap pelecehan seksual. Penguatan edukasi, mekanisme pengawasan, dan evaluasi kebijakan secara berkala diperlukan agar upaya perlindungan perempuan tidak hanya berhenti pada pemisahan ruang, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan transportasi publik yang lebih aman dan setara bagi seluruh pengguna.

Daftar Pustaka

Buku

Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

Dalimoenthe, Ikhlasiah. (2020). Sosiologi Gender. Jakarta: Bumi Aksara.

Lefebvre, Henri., & Nicholson-Smith, Donald. (1991). The production of space. Blackwell Publishing.

Lefebvre, Henri. (1996). Writing on Cities. Oxford: Blackwell Publishing.

Jurnal

Hamidi, A. L., Sekarinasih, A., Sartika, E., & Waseso, H. P. (2023). Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum dalam perspektif gender (Studi kasus pengguna bus Transjateng jalur Purwokerto–Purbalingga). Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 18(1), 33–58. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i1.7766>

Hendra, D. (2018). Analisis pemikiran Henri Lefebvre tentang ruang dalam arsitektur modern: Suatu perspektif sosiologis. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 17(2), 178–192. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9092>

Ibadi, R. M., Roosandriantini, J., Hidayat, A., & Lestari, N. Y. (2025). Teori production of Space Henri lefebvere Dalam Konteks untuk Membaca Ruang di Indonesia. Journal of Architecture and Human Experience, 3(2), 193–202. <https://doi.org/10.59810/archimane.v3i2.175>

Kane, E. F., & Denzin, N. K. (1978). Cover design THE RESEARCH ACT A Theoretical Introduction to Sociological Methods. Retrieved www.routledge.com

Nurhadi, I., Amiruddin, L., & Rozalinna, G. M. (2019). Produksi ruang dan perubahan pengetahuan pada masyarakat sekitar objek wisata Waterland. Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, 3(1), 46–64. <https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrbsb.2019.003.1.04>

WEBSITE

Change.org Indonesia. “Pernah Jadi Korban Pelecehan di Ruang Publik? Kamu Nggak Sendirian.” Change.org. Diakses 7 April 2026. <https://www.change.org/l/id/pernah-jadi-korban-pelecehan-di-ruang-publik-kamu-nggak-sendirian>

Komnas Perempuan. 2025. “Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Angkutan Nasional 2025”. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-angkutan-nasional-2025>

Pusparisa, Yosepha. "Transportasi Umum, Sarang Pelecehan Seksual di Ruang Publik." Databoks Katadata, 28 November 2019. Diakses 7 April 2026.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/fda3f3af80e3861/transportasi-umum-sarang-pelecehan-seksual-di-ruang-publik>